

Nomor Tel *210*/PS730/KKSO4-10/2002

Semarang, 20 Maret 2002

Kepada Yth.
Pembantu Dekan I
Universitas Katolik Soegijapranata
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur
SEMARANG

Perihal : Ijin Penelitian.

Dengan Hormat,

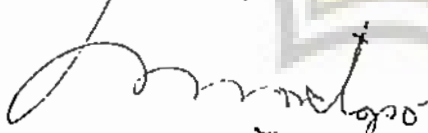
Menunjuk Surat Saudara no. B.2.02/179/UKS.05/III/2002 tanggal Maret 2002 perihal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa pada dasarnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara mengenai ijin untuk melakukan Penelitian dalam rangka tugas akhir bagi mahasiswa Saudara yaitu :

Nama : Rr. Rina Agustina
NIM : 94.20.1203
Fakultas : Hukum

Sehubungan dengan hal diatas, serta mengingat peraturan yang berlaku di PT TELKOM, maka untuk kegiatan penelitian tersebut Ybs diharuskan untuk membuat Surat Pernyataan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, dan terimakasih atas perhatian Saudara

Hormat kami,



MARTOPO PRIJO UTOMO
KETUA KSO-4

Lampiran : 1 lbr

CONTOH III
 Formulir Permohonan izin prinsip
 penyelenggaraan jasa telekomunikasi
 dasar dalam bentuk usaha patungan
 non PMDN/PMA

Nomor : Jakarta, 199
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dalam bentuk usaha patungan non PMDN/PMA. Kepada Yth. Bapak Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi di Jakarta

Sesuai dengan surat Bapak Menteri Nomor tanggal tentang persetujuan kerjasama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dalam bentuk usaha patungan, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin prinsip kerjasama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dalam bentuk usaha patungan.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan akte pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan Patungan, perjanjian usaha patungan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Atas persetujuan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama
 (Perusahaan Patungan)

Tembusan :

1. Dirjen Postel;
2. Direktur Utama Badan Penyelenggara terkait.

CONTOH IV
Formulir izin prinsip kerjasama
penyelenggaraan jasa telekomunikasi
dalam bentuk usaha patungan non
PMDN/PMA

Jakarta, 199

Kepada

Isin prinsip kerjasa-
ma penyelenggaraan
jasa telekomunikasi
dasar dalam bentuk
usaha patungan non
PMDN/PMA.

Yth.....
.....
.....

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor
al perihal permohonan izin prinsip
lenggaraan jasa telekomunikasi dasar dalam bentuk usaha
gan, setelah diadakan penelitian, dengan ini diberitahukan
permohonan Saudara dapat kami setujui. Untuk itu diminta
Saudara melakukan persiapan yang diperlukan guna pelaksanaan
sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dimaksud.

Izin prinsip ini dapat digunakan untuk persiapan
sanaan :

- survai kebutuhan sarana dan fasilitas telekomunikasi di
Lokasi yang ditetapkan;
- pembuatan desain dasar dan detail rinci yang sesuai
dengan persyaratan teknis, konfigurasi dan hirarki
jaringan telekomunikasi berdasarkan perencanaan dasar
loknin dan perencanaan pembangunan ultralogis;
- pengurusan izin-izin lainnya yang diperlukan;
- pembangunan sarana dan fasilitas telekomunikasi.

Izin prinsip ini diberikan untuk waktu 3 (tiga)
terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian untuk menjadi maclum.

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI

Isan :
Direktor Jenderal Postel;
Direktor Utama Badan Penyelenggara terkait.

CONTOH VIII

Formulir Permohonan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dalam bentuk usaha patungan

nomor : Jakarta, 199
 ampiran :
 perihal : Permohonan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dalam bentuk usaha patungan. Yth. Bapak Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

Jl.
 Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar sebagai pelaksanaan dari izin prinsip yang telah kami peroleh dari Bapak Menteri dengan Nomor tanggal

Bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan bahwa sarana dan fasilitas telekomunikasi siap melayani pelanggan, terintegrasi dengan jaringan telekomunikasi yang ada dan dapat dioperasikan.

Atas persetujuan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama
 (Perusahaan Patungan)

lampiran :

Dijer. Postel;
 Direktur Utama Badan Penyelenggara terkait.



CONTOH XI
Formulir Persetujuan kerjasama
penyelenggaraan jasa telekomunikasi
dasar dalam bentuk kerjasama operasi

Nomor : Jakarta, 199
Lampiran :
Perihal : Persetujuan kerjasama
penyelenggaraan jasa
telekomunikasi dasar
dalam bentuk kerjasama
operasi
Kepada
Yth.
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor
tanggal perihal permohonan kerjasama penye-
nggaran jasa telekomunikasi dasar dalam bentuk kerjasama
perasi kegiatan Penyediaan/Penyediaan dan Pelayanan *) setelah
iadakan penelitian, dan dengan memperhatikan hasil seleksi
an evaluasi Tim sesuai dengan surat Nomor
anggal, permohonan Saudara dapat kami
etujui. Untuk itu diminta agar Saudara menghubungi Direksi
I (Persero) Telekomunikasi Indonesia dan/atau Direksi
I (Persero) Indosat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Operasi
maksud.

Demikian untuk menjadikan maklum.

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI

mbusan :
Direktor Jenderal Posel;
Direktor Utama Badan Penyelenggara terkait;
* Coret yang tidak perlu.



CONTOH X
Formulir Permohonan kerjasama
penyelenggaraan jasa telekomu-
nikasi dasar dalam bentuk
kerjasama operasi

Nomor : Jakarta, 199
Lampiran :
Perihal : Permohonan kerjasama
penyelenggaraan jasa
Telekomunikasi dasar
dalam bentuk kerja-
sama operasi.

Kepada
Yth. Bapak Menteri Pariwisata,
Pos dan Telekomunikasi
di
Jakarta

Sehubungan dengan pengumuman mengenai lokasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar Nomor tanggal dengan ini kami mengajukan permohonan kerjasama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dengan Badan Penyelenggara dalam bentuk kerjasama operasi dalam kegiatan Penyediaan/Penyediaan dan Pelayanan *) jasa telekomunikasi dasar di lokasi

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

- a. Akte pendirian perusahaan/koperasi;
- b. usulan rencana usaha yang berkaitan dengan kelayakan usaha;
- c. usulan rencana kerja yang berkaitan dengan tahapan kegiatan;
- d. laporan keuangan tahun terakhir dan telah diaudit oleh akuntan publik/koperasi jasa audit;
- e. pernyataan kesanggupan untuk alih teknologi dan memberikan bantuan teknik;
- f. Pernyataan kesanggupan untuk membuat perjanjian lisensi dengan prinsipal bagi PMA dan PMDN, kecuali PMDN yang tidak mempunyai prinsipal;
- g. pernyataan bahwa data teknis, alat, perangkat, dan sarana atau fasilitas telekomunikasi yang akan diadakan sesuai dengan persyaratan teknis, konfigurasi dan hirarki jaringan telekomunikasi berdasarkan perencanaan dasar teknis dan perencanaan pembangunan strategis;
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam hal calon mitra usaha adalah Badan Usaha Nasional.

Atas persetujuan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PosTel;
2. Direktur Utama Badan Penyelenggara terkait;
- *) Coret yang tidak perlu.

CONTOH IX
Formulir Izin penyelenggaraan
jasa telekomunikasi dasar

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM.

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DASAR

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : a. dst.
- b. dst.
- Mengingat : 1. dst.
- 2. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DASAR.

PERTAMA : Memberi izin penyelenggaraan kerjasama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar kepada :

Nama :
Alamat :
NPWP :

untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar bekerjasama dengan PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia dan atau PT (Persero) Indosat dalam bentuk usaha patungan. Frekuensi radio yang digunakan adalah

KEDUA : Izin ini berlaku sepanjang penerima izin, menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang telekomunikasi dan bidang-bidang lainnya.

/ KETIGA :

CONTOH XII
Formulir Permohonan persetujuan
penyelenggaraan jasa telekomuni-
kasi dasar dalam bentuk kerjasama
operasi

Nomor : Jakarta, 199
Lampiran :
Perihal : Permohonan persetujuan
penyelenggaraan jasa
telekomunikasi dasar Yth. Bapak Menteri Pariwisata,
dalam bentuk kerjasama Pos dan Telekomunikasi
operasi.
di
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan
persetujuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dalam
bentuk kerjasama operasi kegiatan Penyediaan/Penyediaan dan
Pelayanan *) sebagai pelaksanaan surat persetujuan Bapak
Nomor..... tanggal

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan akte
pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan, rancangan perjanjian kerja-
sama operasi dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Atas persetujuan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama

Terbinaat :

1. Bapak Dirjen Postel;
2. Direktur Utama Badan Penyelenggara Terkait;
3. *) Coret yang tidak perlu.

CORION XIV
Formular Permohonan kelaikan operasi
jasa telekomunikasi dasar dalam
bentuk kerjasama operasi

Nomor : Jakarta, 199
Lampiran :
Perihal : Permohonan kelaikan operasi jasa telekomunikasi dasar dalam bentuk kerjasama operasi. Yth. Bapak Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

di
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan kelaikan operasi jasa telekomunikasi dasar sebagai pelaksanaan dari persetujuan yang telah kami peroleh dari Bapak Menteri dengan Nomor tanggal

Bersama ini kami lampirkan pernyataan tertulis Badan Penyelenggara yang menyatakan bahwa sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi siap melayani pelanggan, terintegrasi dengan jaringan telekomunikasi yang ada dan dapat dioperasikan.

Atas persetujuan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama
(Perusahaan Patungan)

Tembusan :

1. Dirjen Postel;
2. Direktur Utama Badan Penyelenggara terkait.